

PENGARUH ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI UTARA

Oleh :
Irjan Sangadji¹
Michael Mamentu²
Trilke Tulung³

ABSTRAK

Kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN telah di mulai sejak di sahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam dinamika perkembangannya ASEAN di arahkan pada pembentukan *Asean Economic Community* (AEC) . Dalam konteks ekonomi, kehadiran AEC seharusnya memberi kenaikan pada ekonomi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh AEC terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dan wawancara dengan stake holder dimana didapati bahwa masuknya AEC ternyata berpengaruh terhadap ekonomi di Sulawesi Utara. Karena dari data yang ada ternyata perumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara pada tahun 2012-2015 menurun dari 6,86%-6,12%. Dengan masuknya AEC mulai pada tahun 2016 dan 2017 ekonomi Sulawesi Utara meningkat 6,17%-6,32%. Tetapi 2018 menurun 6,01% akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Kata Kunci : *ASEAN Economic Community*; Pertumbuhan ekonomi; Sulawesi Utara.

ABSTRACT

Economic cooperation between ASEAN member countries has begun since the declaration of Bangkok in 1967. The purpose of this cooperation is to accelerate economic growth. In the development dynamics of ASEAN directed at the establishment of the Asean Economic Community (AEC). In the economic context, the presence of AEC should give a hike in the economy of North Sulawesi. This research aims to illustrate the influence of AEC on economic growth, especially in North Sulawesi. This research was conducted through data retrieval and interview with the stake holder where the inclusion of AEC was found to affect the economy in North Sulawesi. Because of the data is apparently the economic establishment in North Sulawesi in 2012-2015 decreased from 6.86%-6.12%. With the inclusion of AEC began in 2016 and 2017 economic North Sulawesi increased 6.17%-6.32%. But the 2018 decreased by 6.01% of the trade war between the United States and China.

Keywords: *ASEAN Economic Community*; Economic growth; North Sulawesi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

² Selaku Pembimbing 1

³ Selaku Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) telah dimulai sejak disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara ASEAN pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003, menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*), yang kemudian dikenal dengan *Bali Concord II*. Untuk pembentukan *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015, ASEAN telah menyepakati akan diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada cetak biru (*blueprint*) AEC. *AEC Blueprint* ini memuat empat pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (ASEAN, 2007a dan ASEAN, 2013).

Dalam cetak biru tersebut juga ditetapkan bahwa ada 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan. Tujuh diantaranya adalah sektor barang, yaitu industri agro, perikanan, industri berbasis karet, industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu dan produk kayu, peralatan elektronik, dan otomotif. Sementara sisanya adalah lima sektor jasa, yakni transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi atau *e-ASEAN*.

Dengan melihat letak dan posisi Strategis Sulawesi Utara, sebagai wilayah paling utara negara kita dan langsung berbatasan dengan lautan pasifik, memiliki potensi yang besar sebagai pintu gerbang keluar-masuknya kegiatan ekonomi regional dan global. Dengan demikian, wilayah ini mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengembangkan kerja sama Internasional. Jika semuanya itu dapat dilihat secara jeli dan dimanfaatkan daerah ini akan dapat menggalang kerja sama regional dan internasional yang menguntungkan. Hal ini akan membuat wilayah Sulut menjadi salah satu pusat ekonomi di Indonesia yang memiliki prospek cerah. MEA sangat menentukan berkembangnya ekonomi di Sulawesi Utara.

Sulawesi Utara (Sulut), sebagai bagian kecil dari Indonesia dan sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan Filipina. Akan menjadi panggung pasar empuk bagi MEA. Sebagai panggung empuk produk-produk negara peserta MEA, Sulut harus mampu menghadapi 'serangan' produk-produk tersebut. Sulut harus siap mengisi peluang dalam Indonesia yang sejatinya, ke depan akan menjadi salah satu gerbang dunia. Sulut merupakan jalur perdagangan dunia dan pusat distribusi barang dan jasa sehingga sangat prospektif untuk perdagangan regional maupun internasional. Sulut terus menempatkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Ekonomi Asean

Menurut Ir Eddy Kuntandi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah suatu bentuk program yang bertujuan menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dimana terjadi aliran bebas atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah suatu sistem yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Hal ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan (BBC Indonesia, 2014).

ASEAN *Community* merupakan wujud dari kerjasama intra-ASEAN dalam *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali, Oktober 2003. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu pilar dari perwujudan *ASEAN Vision 2020*, bersama-sama dengan ASEAN *Security Community* (ASC) dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC) (Arifin, 2008).

Menurut Rizal dan Aida dalam (Arifin: 2008) pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapain pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global.

Pencapaian MEA memerlukan implementasi langkah-langkah liberalisasi dan kerja sama, termasuk peningkatan kerja sama dan integrasi di area-area baru antara: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; konsultasi yang lebih erat di kebijakan makro ekonomi dan keuangan; kebijakan pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur, dan hubungan komunikasi; pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; integrasi industri untuk meningkatkan sumber daya regional; serta peningkatan keterlibatan sektor swasta (Arifin, 2008).

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membentuk ASEAN sebagai salah satu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah ada; mempercepat integrasi kawasan dalam sektor-sektor prioritas; mempermudah pergerakan para pelaku usaha; tenaga kerja terampil dan berbakat; dan memperkuat mekanisme institusi ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam (CLMV) melalui *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) dan berbagai inisiatif regional lainnya. Kerjasama lainnya juga akan dilakukan dibidang pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia); pengakuan kualifikasi profesi; konsultasi secara erat mengenai kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, penguatan infrastuktur dan hubungan komunikasi, dan pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, pengintegrasian industri di seluruh kawasan untuk mendorong pemberdayaan kawasan, dan peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki empat karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, (d) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kepentingan bersama Negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif yang baru dengan kerangka waktu yang jelas.

B. Hubungan Internasional

Hubungan Internasional, menurut Suwardi Wiriadmadja dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional*, Hubungan Internasional adalah kajian yang mempelajari berbagai fenomena yang melintas batas negara yang dilakukan oleh apa yang disebut *state actor* dan *non-state actor* yang meliputi individu, bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuasaan, tekanan-tekanan proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.

K.J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Kerangka Analisa*, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi diantara masyarakat dunia dan negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. lebih lanjut dikatakan termasuk dari dalamnya pengkajian terhadap Politik Luar Negeri dan Rolling serta meliputi segala segi hubungan diantara negeri di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional.

Hubungan Internasional menurut Charles A. McClelland dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, Hubungan internasional sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termaksud komponen-komponennya.

J.C. Johari mengemukakan definisi tentang hubungan internasional, yaitu sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku *non* negara (*non state actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.

C. Regionalisme (Kerjasama Kawasan)

Regionalisme sendiri menurut Mansbaach dalam buku *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, yaitu "*Region* atau kawasan adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional".

Karakteristik regionalisme menurut Joseph S. Jr. Nye, seorang teoritis hubungan internasional dari AS yang cukup terkemuka mengemukakan bahwa konsep ini bersifat *ambiguous*. Empat karakteristik didalam mengklasifikasikan suatu kawasan, yaitu:

1. Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis.
2. Mereka memiliki pula kemiripan sosiokultural.
3. Terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional.
4. Kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional.
5. Adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan. (Perwita & Yani, 2005 : 104).

D. Perdagangan Bebas

Menurut Gilpin yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam *Politik Bisnis Internasional*, menyatakan bahwa : "Perdagangan bebas cenderung menciptakan perdamaian dunia karena adanya saling ketergantungan ekonomi yang dapat menciptakan hubungan-hubungan positif antarbangsa yang pada gilirannya akan mengembangkan harmoni kepentingan". (Hadiwinata, 2002 : 28).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, John W. Cresswell mengemukakan penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan peneliti kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh. Laporan akhir penelitian kualitatif memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bersifat induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi. Penelitian ini berfokus untuk meneliti lebih mendalam tentang Pengaruh Asean Economic Community Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid Perdagangan Luar Negeri Perindag Sulut, Kepala Seksi Neraca Produksi BPS Sulut, Kabid Pengendalian Penanaman Modal BKPM Sulut dan Kasub Bagian Analisis Makro Ekonomi Biro Perekonomian Setda Sulut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Pengambilan data, Wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara sebuah daerah yang terletak di paling utara pulau Sulawesi. Sulawesi Utara merupakan sebuah provinsi yang beribukota Manado. Berdasarkan data hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk yang berada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 2.270.059 jiwa dengan perincian 1.159.903 laki-laki dan 1.110.693 berjenis kelamin perempuan.

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 15 Kabupaten kota yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon.

Provinsi yang dihuni oleh Suku terbesar yang berasal dari Minahasa terletak di 0° 0? – 6° 0? LU dan 122° 40? – 127° 20? BT, yang sekarang dipimpin oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Sejumlah Gubernur pernah memimpin provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Filipina dibagian utara yaitu: F.J.Tumbelaka (Pj.Gubernur 1964-1965); Soenandar Prijosoedarmo (Pj.Gubernur 1965-1966); Abdullah Amu (Pj.Gubernur 1966 – 1967); H.V. Worang (1967 – 1978); Willy Lasut.G.A (1978-1979); Erman Harirustaman (Pj.Gubernur 1979-1980); G.H. Mantik (1980-1985); C.J. Rantung (1985-1990); E.E.Mangindaan (1995-2000); Drs. A.J. Sondakh (2000-2005); Ir. Lucky H. Korah, MSi (Pj. Gubernur 2005); Drs.S.H.Sarundajang (2005-2010); Robby Mamuja (Plh. Gubernur 2010); Drs.S.H.Sarundajang (2010-2015); Siswa Rachmat Mokodongan (Plh. Gubernur 2015); Soni Sumarsono (Pj. Gubernur 2015-2016); dan Olly Dondokambey (2016-2020).

Sementara yang pernah menduduki posisi Wakil Gubernur Sulut yaitu; Drs. Abdullah Mokoginta (1985-1991); A. Nadjamuddin (1991-1996); J. B. Wenas (Wagub Bidang Pemerintahan dan Kesra, 1997-2000); Prof. Dr. Hi. H. A. Nusi, DSPA (Wagub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, 1998-2000); Freddy H. Sualang (2000-2010); Djouhari Kansil (2010-2015); dan Steven Kandouw (2016-2020).

B. Asean dan Masyarakat Ekonomi Asean

ASEAN sebagai gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) memiliki pandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, serta terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang dinamis. Untuk itu, pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk membangun suatu “Masyarakat ASEAN” pada tahun 2020. Dalam perkembangannya para pemimpin Negara anggota mempertegas komitmennya dan memutuskan untuk mempercepat pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015.

Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) 2015, akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM.

Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja.

Implementasi AEC 2015 akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas 7 (tujuh) sektor barang (industri pertanian, peralatan elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan 5 (lima) sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau e-ASEAN).

Berlakunya komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community pada 2015 perlu disambut sebagai hal positif karena akan meminimalkan biaya angkut ekspor ke negara-negara ASEAN. Namun, Indonesia harus menetapkan strategi yang menggiatkan pembangunan industri-industri pengolahan selama masa persiapan.

C. Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara ASEAN

Menurut laporan *The Economist*, pertumbuhan ekonomi di ASEAN melambat tetapi masih dalam taraf baik. Pertumbuhan Indonesia pun diprediksi tetap di kisaran 5,2 persen tahun ini. Myanmar memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN. Bank Dunia menyebut ekonomi Myanmar tumbuh berkat kuatnya manufaktur garmen, pengeluaran infrastruktur, dan liberalisasi sektor ritel, asuransi, dan perbankan. Singapura dan Brunei memiliki pertumbuhan ekonomi terendah, tetapi sebetulnya pertumbuhan Brunei naik 0,4 persen. Pertumbuhan 0,4 persen adalah yang tertinggi di ASEAN. Ekonomi Thailand juga tercatat minus 0,6 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar 4,1 persen, dan terakhir pertumbuhan Filipina juga menurun 0,5 persen dari tahun lalu yang sebesar 6,2 persen. Malaysia dan Vietnam yang mencatat pertumbuhan ekonomi yang melaju stabil. Tercatat pertumbuhan ekonomi Malaysia naik menjadi 4,9% pada kuartal II 2019 dari sebelumnya 4,5% pada kuartal I 2019 dan kuartal II 2018. Sementara Vietnam berada di angka 6,71% pada kuartal II 2019 dari 6,82% pada kuartal I 2019 dan 6,73% pada kuartal II 2018. Risiko besar yang menjadi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi adalah berlarut-larutnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam negosiasi perdagangan. Akibatnya, sektor swasta memutuskan bersikap tunggu dan lihat, yang pada akhirnya membuat investasi melambat dan produksi menurun.

D. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

Kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara atau ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA merupakan hasil kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional Asia Tenggara.

AFTA dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura, tahun 1992,

tujuannya menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya dalam waktu 15 tahun (1993-2008), yang kemudian dipercepat menjadi tahun 2002.

AFTA menggunakan skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA), untuk mewujudkan penurunan tarif hingga 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan non tarif lainnya.

Skema CEPT-AFTA ini menghasilkan kesepakatan penghapusan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura pada tahun 2010, serta bagi Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar pada tahun 2015.

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Indonesia dan 9 negara anggota ASEAN telah menyatakan untuk menerapkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 pada tanggal 31 Desember 2015 guna mendukung AFTA (ASEAN Free Trade Area) atau Pasar Bebas Asia Tenggara.

Tujuan dari AEC/MEA adalah menciptakan daya saing negara-negara ASEAN dalam menarik investasi asing. Investasi asing sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan. AEC/MEA akan membuka kesempatan bagi suatu negara untuk menjual produk dan jasa ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara dengan mudah, sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Tujuan dari Perjanjian Perdagangan bebas adalah untuk mencapai arus bebas barang di ASEAN (Asia Tenggara) sebagai salah satu sarana utama untuk mendirikan pasar tunggal dan basis produksi untuk integrasi lebih dalam ekonomi kawasan. Perjanjian pada Umumnya Efektif tarif preferensial Skema bagi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN mensyaratkan bahwa tingkat Tarif yang dikenakan pada berbagai produk yang diperdagangkan di kawasan ini dikurangi menjadi tidak lebih dari lima persen.

Perjanjian Perdagangan bebas sangat dekat dengan realisasi penuh. 98,58% dari total produk ASEAN telah dibawa ke dalam daftar Inklusi CEPT (IL), dan Tarif dari 93,67% dari produk ini telah dikurangi menjadi 0-5% dalam. Tarif atas 98,67% dari produk dalam IL (*Inclusion List*) ASEAN-6 telah dibawa ke kisaran 0-5%.

E. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara

Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis, mulanya dari 6,86 persen pada tahun 2012 turun ke posisi angka 6,38 persen pada tahun 2013 dan turun lagi di posisi angka 6,31 persen pada tahun 2014 hingga 2015 menjadi titik akhir dalam turunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Semenjak masuknya MEA Pada tahun 2016 mencetak pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang mengalami perlambatan. Pada tahun 2016 ekonomi Provinsi Sulawesi Utara melaju lebih cepat yakni sebesar 6,17 persen dan tahun 2017 sebesar 6,32 persen. Pada tahun 2018 ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan sebesar 6,01 persen di akibatkan karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Perang dagang Amerika Serikat dan China mulai pada 8 maret 2018 pada saat Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif 25% pada impor baja dan 10% pada aluminium dari sejumlah negara termasuk China.

F. Pemanfaatan Asean Economic Community Oleh Sulawesi Utara

Pemanfaatan AEC 2015 oleh Sulawesi Utara yaitu penurunan biaya perjalanan transportasi, menurunkan secara cepat biaya telekomunikasi, meningkatkan jumlah pengguna internet, informasi akan semakin mudah dan cepat diperoleh, meningkatnya investasi dan lapangan kerja.

Sumber daya manusia atau kualitas hidup manusia, juga dalam hal yang sama meningkatkan sumber daya alam yang dimiliki Sulut. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi SDA unggulan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata.

Berbagai potensi ini didukung perencanaan pembangunan berbasis “strategi Sam Ratulangi-an” dalam bentuk peta jalan pembangunan ekonomi Sulawesi Utara yaitu melalui pengembangan potensi industri unggulan dan membangun ketahanan lokal dan daya saing.

Sirkulasi arus laut dunia dapat memberikan dampak yang besar bagi pengembangan industri, terkhusus dalam hal kelautan dan perikanan. Arus perputaran air dunia yang disebut “Great Ocean Conveyor Belt (GOCB)” ini mempengaruhi penyebaran peta arus pergerakan Ikan. Arus ini membawa aliran ikan (salah satunya Tuna) kedalam wilayah laut pasifik, termasuk wilayah Sulawesi Utara dan KTI.

Letak geografis Sulut yang menjadi lokasi arus GOCB (*Great Ocean Conveyor Belt*), membawa potensi besar bagi industri dalam hal maritim industri sektor unggulan perikanan. Industri perikanan dapat menjadi pilihan strategi untuk sumber daya swadaya ikan menjadi keunggulan kompetitif dan membawa nilai yang besar, dengan demikian industri perikanan dapat diekspor dalam pasar internasional melalui kerjasama perdagangan dengan negara lain. sebagai contoh di tahun 2008 export ikan tuna (Katsubushi) dari Sulawesi Utara ke Jepang tercatat mencapai volume 2,006,834.40 kg dengan nilai 7,792,005.78\$. Performa ekspor ikan Sulut menjadi sebuah nilai ekspor bagi Sulut dalam perdagangan dunia.

G. Perdagangan Sulut di Kawasan ASEAN

Sulawesi Utara dalam Indonesia, memiliki banyak potensi di bidang pariwisata. Karakter alami masyarakat Sulawesi Utara, disimpulkan sebagai modal dasar yang besar dalam industri pariwisata. Modal dasar ini dapat menyita masyarakat negara-negara di lingkup MEA ketika pemerintah secepatnya memperbaiki jalur transportasi, penerbangan, infrastruktur hotel, penginapan, dan perlindungan atas wilayah-wilayah pariwisata, kemampuan sumber daya manusia (termasuk penguasaan bahasa Inggris) dan lain sebagainya.

Sulut akan mampu menjadi bagian kecil dari Indonesia dalam arena MEA, sebagaimana jauh sebelumnya sudah diingatkan oleh Dr Gerungan Saul Semual Jacob Ratulangi (1890-1949) ikhwal geoposisi Indonesia-pasifik bagi ekonomi dunia : (1) sebagai negeri konsumen; (2) negeri sumber bahan mentah; dan (3) sebagai negeri tempat penanaman modal.

Sulut, merupakan salah satu titik di Indonesia akan berperan dalam lalu lintas ekonomi dunia. Lintasan ini, sebetulnya sudah dirintis sejak zaman kolonial. Tanah di bumi Nyiur Melambai mengandung kekayaan bahan-bahan mentah mineral, permukaannya menghasilkan bahan mentah pertanian untuk ekonomi dunia. Sementara dari aspek masyarakatnya, penduduk Sulut termasuk dalam kategori giat bekerja sekalipun dengan tingkat hidup rendah.

Ketika MEA mulai berlaku, investasi semakin dinamis masuk ke Sulut seiring dengan perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan (Ring Road II, III dan Jalan Tol Manado-Bitung). Alur Sulut akan terus menggairahkan pengembangan di sektor pariwisata *mixed*, maritim-perikanan dan pertanian-perkebunan sudah begitu nampak terlihat. Meski akan *concern* pada tiga aspek itu, sejatinya Gubernur Olly Dondokambey secara mendasar tidak pernah akan mengabaikan aspek sumber daya manusia.

H. Hasil dan Capaian

Pertumbuhan ekonomi Sulut terus menunjukkan geliat positif, sejalan dengan perkembangan global dan nasional. Tahun 2017, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh hingga 6,32% dan merupakan tertinggi dalam empat tahun terakhir, di triwulan III tahun 2018, ekonomi Sulawesi Utara mencapai 6,01%, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,27%.

Sementara itu, berkat program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mampu kita tekan hingga 7,59% di tahun 2018, dari sebelumnya berada pada angka 8,20% di tahun 2016. Begitu pula pengangguran yang menembus angka 6,86% di tahun 2018, dari sebelumnya sebesar 7,18% di tahun 2017.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran telah turut menjadikan program ODSK mendulang sukses, dimana program ODSK telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pemerintah Daerah, serta Penghargaan Adhi Purna Prima Award, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se-pulau Sulawesi.

Dalam bidang pekerjaan umum, realisasi fisik pembangunan Bendungan Lolak sampai dengan tahun 2018 sebesar 60%, dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Sementara, realisasi fisik pembangunan Bendungan Kuwil sampai dengan tahun 2018 sebesar 36,5%.

Selanjutnya, di sektor pariwisata, di tahun 2018, Sulut berhasil melampaui target jumlah kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara. Adapun target RPJMD untuk jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara adalah 1,5 juta dan hasil yang dicapai adalah 1.958.899 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 berjumlah 1.698.523 orang.

Sedangkan target untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara adalah 100.000 orang dan hasil yang dicapai adalah 127.879 orang, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 87.976 orang.

Penghargaan kepada sejumlah instansi dan perusahaan di antaranya Silk Air atas kerja sama melayani selama 25 tahun penerbangan Manado-Singapura, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan instansi lainnya.

Selain itu, turut diserahkan bantuan alat pertanian berupa traktor dan hand traktor bagi kelompok tani serta dana hibah kepada sejumlah lembaga dan organisasi keagamaan diantaranya Keuskupan Manado, Sinode GMIST, Sinode Germita, Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG-LKK), Masjid Raya Ahmad Yani, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah dan FKUB. Setiap keberhasilan yang telah dicapai selama tiga tahun kepemimpinan OD-SK harus semakin memotivasi untuk terus berbuat dan berkarya bagi kemajuan daerah tercinta, dan setiap tantangan dan hambatan harus senantiasa menjadi pembelajaran untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang.

PENUTUP

Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis, mulanya dari 6,86 persen pada tahun 2012 turun ke posisi angka 6,38 persen pada tahun 2013 dan turun lagi di posisi angka 6,31 persen pada tahun 2014 hingga 2015 menjadi titik akhir dalam turunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Semenjak masuknya MEA Pada tahun 2016 mencetak pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang mengalami perlambatan. Pada tahun 2016 ekonomi Provinsi Sulawesi Utara melaju lebih cepat yakni sebesar 6,17 persen dan tahun 2017 sebesar 6,32 persen. Pada tahun 2018 ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan sebesar 6,01 persen di akibatkan karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Pemerintah harus mencari cara agar perekonomian Sulawesi Utara harus stabil walaupun sementara terjadi perang dagang antar Negara Amerika Serikata dan China.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Sjamsul, Rizal A. Djaafara, dan Aida S. Budiman. 2008. *Masyarakat Eknomi ASEAN (MEA) 2015*. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Bakry, Umar Suryadi. 2015. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chik, Abdul razak, Norzilah Hj. Aziz dan Azizah MD. Yusof. 2010. *Kerjasama Ekonomi ASEAN Peralihan dan Perubahan Sekretariat Asean*. Universiti Utara Malaysia : Kuala Lumpur.

- Coplin, William D. 1992. *"Pengantar politik Internasional" Suatu Telaah Teoritis*. Bandung : Sinar baru.
- Coulombis, Theodore A, James H. Wolfe. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. Bandung: Putra Bardin.
- Dougherty, James dan Robert Manzingtios. 1996. *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Study*. New York: 4th Edition.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2002. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Terjemahan oleh Wawan Djuanda. Bandung: Bina Cipta.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2014. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Luhulima. 2008. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McClelland, Charles. A. 1986. *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda.
- Plano Jack L. dan Olton, Roy. 1999. *"Kamus Hubungan Internasional"*, (terjemahan Wawan juanda) Jakarta: Putra A. Bardin
- Sudirman, Arifin, Nuraeni S, dan Deasy Silvy. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suriasumantri. 2005. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soeprapto, R. 1997. *Hubungan Internasional : Sistem Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Theodore Colombis dan James H Wolfe. 1990. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: A. Bardin
- Wiriadmadja, Suwardi. 2000. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: Pustaka Gramedia.

Sumber Lainnya:

- Freiti Inri M. 2017. *Kerja Sama Ekonomi Sulawesi Utara dengan Filipina Pasca Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Pelayaran Laut Roll-On Roll-Off Davao-General Santos-Bitung)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sam Ratulangi: Manado.
- <https://sulut.bps.go.id/>
- <http://www.depkop.go.id/masyarakat-ekonomi-asean>
- <https://www.kompasiana.com/headlinewisata/576ffa75f49273a30844dfe3/sulut-gerbang-indonesia-di-arena-mea?page=all>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4020268/melihat-pertumbuhan-ekonomi-di-asean-indonesia-peringkat-berapa>
- <http://www.seputarsulut.com/profil-provinsi-sulawesi-utara/>